

BAB III

KERJASAMA INDONESIA-HONGARIA DAN KRISIS KEUANGAN YANG MELANDA EROPA

Menjalinkan kerjasama antara satu negara dengan negara lain adalah hal yang harus dilakukan oleh negara berkembang demi meningkatkan perekonomiannya. Kerjasama internasional tersebut dapat dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Negara berkembang pada dasarnya akan menjalin kerjasama dengan negara maju yang sudah jelas kekuatan ekonominya. Namun, di beberapa kasus ternyata ada juga negara berkembang yang menjalin kerjasama dengan sesama negara berkembang juga. Contohnya, kerjasama internasional antara Indonesia dan Hongaria. Yang mana menjadi fokus dalam penelitian ini.

A. Hubungan Indonesia dan Hongaria

1. Hubungan Diplomatik Antara Indonesia-Hongaria

Hubungan ekonomi politik antara Indonesia dan Hongaria memiliki sejarah panjang dengan hubungan diplomatik yang telah didirikan sejak tahun 1955. Kedutaan Hongaria bahkan mulai dibuka di Jakarta pada tahun 1957. Dalam 60 tahun sejak itu, beberapa perubahan dan peristiwa dramatis terjadi di kedua negara. Pada saat membangun hubungan diplomatik antara kedua negara, Hongaria terikat dengan Uni Soviet bersama dengan sistem ekonomi politik Soviet yang terpusat. Sedangkan Indonesia, baru saja memperoleh reputasi internasional dengan menyelenggarakan konferensi di Bandung pada tahun 1955, yang kemudian menyebabkan tahun 1961

sebagai tahun pembentukan Gerakan Nonblok. Meskipun sistem politik kedua negara ini berbeda, mereka berbagi beberapa karakteristik sehubungan dengan perkembangan politik dan tantangan ekonomi.

Kunjungan tingkat tinggi pertama di tahun 1980-an merupakan wasiat untuk mengintensifkan kepentingan ekonomi antara kedua negara. Niat untuk memperbaiki hubungan itu dinyatakan dalam penandatanganan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*The Double Taxation Avoidance Agreement*) antara Indonesia dan Hongaria pada tahun 1989. Kerangka kerjasama yang lebih baik, namun, tidak dapat disesuaikan dengan hubungan ekonomi yang semakin mengikat dalam dekade mendatang karena urutan perubahan ekonomi dan tren di tahun 90-an yang sama sekali berbeda di kedua negara, sehingga membuat hubungan ekonomi antar keduanya sulit 'dipelihara'.

Pada awal tahun 1990, Hongaria menghadapi masa yang sangat sulit dari restrukturisasi ekonomi, resesi transformasional dan ketidakseimbangan ekonomi makro yang besar yang mengakibatkan resesi selama beberapa tahun, dan melonjaknya tingkat pengangguran yang hanya bisa stabil di paruh kedua tahun 1990. Setelah stabilisasi pada tahun 1997, pemulihan ekonomi di Hongaria relatif cepat dan diikuti dengan perkembangan ekspor yang dinamis. Walaupun demikian, ketidakseimbangan masih terlihat dalam berbagai bidang selama bertahun-tahun.

Ketika tren ekonomi telah berubah menjadi sesuatu yang menjanjikan di Hongaria, krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia menciptakan situasi ekonomi yang sangat sulit dengan melonjaknya hutang

perusahaan karena semakin menurunnya permintaan domestik, eksternal dan *non-performing loan* dalam perekonomian yang lumpuh oleh depresiasi tajam dari mata uang. Krisis tersebut dapat dikatakan telah memukul perekonomian Indonesia menjadi yang terburuk di kawasan itu dan menyebabkan penurunan sebesar 13,1% PDB pada tahun 1998.

2. Kerjasama Perdagangan Dan Investasi Antara Indonesia dan Hongaria

Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Hongaria sendiri dapat kita lihat dalam pengesahan Perpres Nomor 15 tahun 2013 (lihat Lampiran 1) yang berbunyi "*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Cooperation*" yang telah ditandatangani oleh Presiden SBY pada 25 Juli 2005 di Jakarta.

Dalam proses kerjasamanya, Indonesia dan Hongaria mendirikan *Joint Commision on Bilateral Economic Cooperation* (JCEC) pada tahun 1988. Sejak itu, volume perdagangan bilateral Indonesia-Hongaria berfluktuasi selama bertahun-tahun. Perdagangan bilateral meningkat dari US \$ 37 juta pada tahun 1993 menjadi US \$ 216 juta pada tahun 2003. Namun, perdagangan kedua negara ini kemudian menurun sebesar US \$ 126.3 juta pada tahun 2004, US \$ 124.8 juta pada tahun 2005, US \$ 101.9 juta pada tahun 2006, dan US \$ 114.9 juta pada tahun 2007 (Indonesia M. o., 2013).

Tabel 3.1 Realisasi Impor Indonesia dari Hongaria

Uraian	Nilai USD							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Petroleum Jelly & similar products	2.743.872	1.605.934	286.192	283.934	401.891	473.009	395.460	245.091
Electrical Transformers, statics converter	161.515	404.275	8.717	172	2.405	51.497	111.221	112.593
Antibiotics	182.084	46.732	-	39.900	56.465	32.339	35.398	40.346
Electrical Apparatus	-	7.639	2	-	4	207	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik-BPS (diolah oleh PDSI Kementerian Perdagangan).

Pada tabel di atas, terdapat tiga macam barang dari ratusan uraian produk impor Indonesia dari Hongaria. Dilihat dari nilai USD tertinggi hingga yang terendah pertahun sejak tahun 1996 hingga tahun 2003.

Pada tahun 2000 ekpornya mencapai USD 98,00 juta namun kemudian mengalami penurunan hingga posisi terendah sebesar USD 31,00 Juta pada tahun 2003. Ekspor Indonesia ke Hongaria berupa karet dan produk-produknya, termasuk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, rempah-rempah, kulit, rotan, plastik dan kerajinan. Sementara ekspor Hongaria ke Indonesia adalah obat-obatan, bahan kimia, listrik, elektronik dan produk optik, peralatan teknik listrik dan mesin. Investasi Hongaria di Indonesia senilai US \$ 400 ribu pada periode antara 1999-2009, dan saat ini meningkat menjadi US \$ 590 ribu, dalam lima proyek (Embassy of Republic of Indonesia, 2016).

Tabel 3.2 Produk Ekspor Teratas Indonesia ke Hongaria

Komoditi	Nilai (juta euro)	Pangsa (%)
Natural Rubber, Balata, Gutta-Percha, Guayule, Chicle.	21.17	21.02
Printing Machinery Used For Printing By Means Of Plates.	10.93	10.85
Electric Accumulators.	10.31	10.23
Parts And Accessories.	10.23	10.16
Parts And Accessories Suitable For Use Solely Or Principally.	8.37	8.31
Microphones And Stands Therefor (Excl. Cordless Microp1h.	7.29	7.24
Parts Suitable For Use Solely Or Principally With Transmis4s.	3.10	3.07
Electric Motors And Generators.	2.28	2.27
Insulated "Incl. Enamelled Or Anodised" Wire, Cable "Incl. C.	2.18	2.16
Video Recording Or Reproducing Apparatus.	1.57	1.56
Total Impor Hongaria dari Indonesia		100.70

Sumber: Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan (Kementerian Perdagangan, Ekspor Produk Teratas Indonesia, 2012).

Kemudian, selama periode tahun 2001 hingga 2008, kinerja impor Hongaria untuk produk Indonesia terlihat menurun. Terlihat total impor Hongaria mengalami penurunan mencapai 8,3% per tahun. Pada tahun 2001 total impor mampu mencapai angka USD 123,72 juta namun harus menurun pada tahun 2008 menjadi USD 90,54 juta. Tidak hanya itu, kinerja impor produk elektronik Hongaria juga menurun sebesar 9,6% per tahunnya. Dimana nilai impor yang tadinya USD 49,53 juta di tahun 2001 turun menjadi USD 34,19 di tahun 2008.

B. Krisis Keuangan Di Eropa

Uni Eropa adalah kelompok negara-negara dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang luar biasa. Uni Eropa juga merupakan kawasan

dengan 550 juta orang di 28 negara anggota yang terbagi dalam 4,4 juta kilometer persegi. Kekuatan ekonominya berkisar dari teknologi dan manufaktur yang kompleks untuk pertanian dan pariwisata yang sangat terkenal di dunia. Keragaman dalam kekuatan ekonomi ini bisa dibilang aset terbesar Eropa dan merupakan tantangan terbesarnya. Adanya keragaman ini dan ketegangan antara kesatuan, kerjasama, dan perbedaan, telah mendorong krisis keuangan yang terjadi di Eropa.

Finansial di Eropa merupakan gambaran dari kemajuan ekonomi regional yang sangat ideal. Banyak negara di luar Eropa berusaha untuk memajukan sektor ekonominya seperti negara-negara Eropa. Sayangnya, pada tahun 2011 Eropa mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Negara-negara yang masuk kategori lapisan pertama dalam kawasan Euro (*Euro Zone*) di antaranya Portugal, Irlandia, dan Yunani merupakan negara-negara yang mengalami defisit dalam anggaran pemerintahan dan mengalami peningkatan rasio hutang per PDB yang berakibat pada penurunan kemampuan terhadap pembiayaan defisit (BPPN, 2011).

Defisit ini secara otomatis akan mengarahkan pada perlambatan bahkan penurunan perekonomian pada negara-negara di kawasan Eropa, apalagi terjadinya stagnasi pada kebijakan moneter, adanya keterbatasan ruang gerak fiskal, serta sedikitnya upaya yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Eropa untuk melaksanakan restorasi ekonomi regional memperparah kondisi di kawasan ini.

Munculnya penggunaan hutang yang tidak efisien dan tidak terarah dengan baik jelas akan membuat beban anggaran pemerintah negara-negara di kawasan Euro semakin menumpuk (BPPN, 2011). Tekanan fiskal yang demikian ini yang kemudian

akan mengakibatkan melemahnya ketahanan ekonomi regional dan berkurangnya kesempatan kerja di kawasan Eropa. Adapun Bhagwati menjelaskan dalam bukunya bahwa dinamika ekonomi akan terus mengalami sirkulasi, kejayaan dan keruntuhan (Bhagwati, 2004). Menurut Bhagwati jika pembangunan ekonomi berbasis pada arus modal yang bebas maka akan terjadi fenomena *diminshing return*, yang akan berdampak pada terakomodasinya sumber tenaga kerja, namun secara bertahap akan ada pengurangan pada proses produksi akibat menurunnya output yang dihasilkan. Setelah terjadinya krisis, tentu ada perubahan dari metode-metode investasi dan produksi sebagai akibat dari krisis finansial tersebut.

Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat peningkatan yang sangat signifikan dalam defisit anggaran negara-negara Eropa khususnya negara-negara di kawasan Euro. Defisit fiskal negara Eropa bahkan telah melebihi angka 30% per PDB. Peningkatan defisit fiskal yang terjadi di Irlandia pada tahun 2010 bahkan mencapai 32,4% per PDB, angka ini tentu sangat jauh selisihnya dengan defisit anggaran pada tahun 2009. Berdasarkan defisit-defisit ini yang kemudian menunjukkan adanya krisis finansial yang berpotensi meluas ditengah kemajuan industri dan sektor finansial Eropa.

Krisis yang terjadi di Eropa juga erat kaitannya dengan krisis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang 'menghantam' sektor perbankan di Uni Eropa. Dari tabel ini, IMF sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas krisis keuangan yang terjadi di dunia juga bertugas untuk memperkirakan munculnya dampak yang parah jika Eropa gagal mengatasi krisis utang yang melanda

negara-negaranya ataupun gagalnya rencana kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat (Latif, 2011).

Tabel 3.3 Peningkatan Hutang Luar Negeri dan Defisit Anggaran Pemerintah Negara Euro Zone

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jerman	-3,8	-3,3	-1,6	0,3	0,1	-3,0	-3,3
Irlandia	1,4	1,6	2,9	0,1	-7,3	-14,3	-32,4
Yunani	-7,5	-5,2	-5,7	-6,4	-9,8	-15,4	-10,5
Spanyol	-0,3	1,0	2,0	1,9	-4,2	-11,1	-9,2
Perancis	-3,6	-2,9	-2,3	-2,7	-3,3	-7,5	-7,0
Italia	-3,5	-4,3	-3,4	-1,5	-2,7	-5,4	-4,6

Sumber: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (2011).

Pada tahun 2009, PDB riil Uni Eropa diproyeksikan menyusut sebesar 4% (European Commission, 2009), dimana hal ini merupakan penurunan yang signifikan dalam sejarah Uni Eropa. Hutang yang melanda Yunani, menyebabkan penyebaran krisis ke negara-negara Irlandia, kemudian Portugal. Utang yang dijamin oleh Yunani melampaui PDB negara, begitu juga dengan belanja negara yang mengalami defisit, dan pada saat itulah krisis mulai dibayarkan oleh negara-negara Eropa mulai terbuka untuk umum. Menurut Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (2011), sistem yang terintegrasi, membuat Uni Eropa berada pada posisi teratas defisit APBN, dan rendahnya rasio PDB satu lapisan negara saja, bisa membuat negara-negara lain ikut terkena dampak.

1. Awal Mula Krisis Eropa

Ekonomi global menghadapi tekanan yang besar akibat krisis yang terjadi setelah krisis Amerika tahun 2008 yaitu krisis Eropa ini. Krisis keuangan di Eropa

berawal dari defisit anggaran pemerintah di negara-negara Eropa. Sementara itu melebarnya defisit anggaran pemerintah ternyata dibarengi dengan rasio hutang per PDB yang menyebabkan kemampuan memperoleh pembiayaan defisit menjadi terbatas. Adanya kebijakan moneter yang tidak berjalan dengan baik di kawasan Euro, adanya keterbatasan ruang gerak fiskal, dan upaya pemulihan yang tidak dijalankan, akhirnya mendorong perlambatan bahkan penurunan perekonomian pada beberapa negara di kawasan Eropa (BPPN, 2011). Adapun negara lapisan pertama dan sebagai akar masalah adalah Yunani. Krisis utang di Yunani ini perlahan menyebar ke Irlandia dan Portugal, hal ini juga memberikan efek domino ke beberapa negara Uni Eropa lainnya.

Berdasarkan jurnal info ekonomi dan kebijakan publik yang dijelaskan oleh Achmad Wirabrata (2015), bahwa pemerintah Yunani ternyata gagal membayar utang kepada *International Monetary Fund* (IMF) sebesar €1,5 miliar atau sekitar Rp 22 triliun yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 kemarin. Jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah utang luar negeri Yunani yang diperkirakan sekitar 243 miliar Euro. Karena kegagalan pihak Yunani dalam membayar utang tersebut, negara ini bangkrut dan kini hanya hidup dari uang pinjaman sementara.

Wirabrata juga menjelaskan bahwa memperketat pengendalian modal merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah Yunani. Banyak Bank di negarai ini yang terpaksa tutup untuk mencegah arus keluar uang tunai. Hal ini mengakibatkan masyarakat Yunani tidak dapat menarik uang dengan jumlah yang

besar. Menurunnya daya beli masyarakat tentu saja dapat menyebabkan situasi yang berakhir dengan kemiskinan dan pengangguran. Tidak sampai di situ saja, krisis Yunani menjadi semakin parah dengan tingkat hutang PDB yang mencapai 177%. Pertumbuhan PDB negara ini yang hanya mencapai 0,2% itu, mau tidak mau pasti akan memberi dampak pada tingginya risiko kegagalan dalam membayar hutang.

Yunani menjadi negara (maju) pertama di Eropa yang bangkrut akibat tidak bisa membayar utang. Kondisi perekonomian Yunani masih tetap terpuruk, walaupun sudah mendapatkan bantuan sebesar € 240 miliar pada tahun 2010. Pada 1 Januari 2001 tepatnya setelah bergabungnya Yunani dengan zona Euro (*Eurozone*), Yunani langsung menjadi korban pertama krisis finansial global yang muncul pada 2007-2008 akibat banyaknya hutang yang dimilikinya. Tidak hanya itu, dampak yang dirasakan Yunani juga berimbas ke-19 negara zona Euro lainnya karena sebagai negara anggota mereka harus ikut membantu dalam memulihkan perekonomian Yunani.

Perlahan-lahan krisis finansial Yunani menjadi semakin memburuk. Utang negara mencapai 107% dari penghasilan nasional pada 2007 dan 177% pada tahun 2014. Angka ini jauh di atas batas yang ditetapkan Uni Eropa, yaitu sebesar 60% saja. Pada Maret 2015, Badan Pengelolaan Utang Yunani menunjukkan adanya beban utang negara itu yang mencapai € 312,7 miliar atau sekitar Rp 4.600 triliun atau setara dengan 174,7% di atas GDP (Wirabrata, 2015).

Saat ini, deflasi yang dialami oleh Yunani mencapai 2,1% dan deflasi terendahnya selama 3 tahun terakhir ada pada bulan Februari yang mencapai 2,9%.

Hal ini bisa kita lihat pada kondisi politik dan ekonominya yang memburuk. Bertambahnya jumlah pengangguran merupakan konsekuensi yang harus dihadapi Yunani akibat deflasi tersebut. Angka pengangguran di Yunani sebesar 25,6% atau sekitar 1,3 juta orang penduduk.

Perlu kita ketahui bahwa krisis keuangan di Eropa ini adalah tentang penumpukan besaran menyusul hutang di Spanyol dan Italia oleh perusahaan-perusahaan dan individu yang meminjam lebih dari yang mereka mampu dan menggunakan uang itu untuk membeli rumah dan mobil, serta membayar untuk liburan. Hutang menjadi begitu luas pada tahun 2011, total hutang sebagai persentase dari output ekonomi tahunan telah meningkat di atas 300% untuk Perancis, Italia, dan Spanyol dan di atas 250% untuk Yunani. Bahkan fiskal konservatif di Jerman, total utang sebagai persentase dari output ekonomi tahunan adalah sekitar 240%.

Namun, setelah di analisa, krisis keuangan Eropa ternyata lebih dari sekedar kebijakan fiskal, perpajakan, likuiditas, suku bunga dan *bailouts*. Ada unsur manusia dalam krisis ini yang terlalu sering diabaikan, dan bisa jadi berpotensi lebih penting daripada unsur keuangan itu sendiri. Dampak krisis keuangan terhadap masyarakat Uni Eropa dapat dilihat dimana-mana. Data statistik menunjukkan: level saat ini pengangguran tidak hanya melumpuhkan ekonomi, tetapi mematahkan semangat, harapan, dan optimisme warga Eropa. Pada Maret 2013, jajak pendapat oleh Pew Charitable Trusts menemukan dukungan hanya 41% untuk Uni Eropa di antara seluruh negara Eropa, dengan penilaian persetujuan sangat rendah di negara-negara

dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini merupakan gejala dari unsur manusia yang dampaknya lebih meluas dibanding kebijakan fiskal.

Uni Eropa dapat dikatakan sebagai area kerjasama ekonomi, menuju saling ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan bersama dan keberlanjutan, dan kualitas hidup yang tinggi untuk semua. Dalam rangka untuk mencapai potensi ekonomi dan politik sejati Uni Eropa, komunitas dan penduduk Uni Eropa akan diperlukan untuk menggeser dinamika ke arah yang menguntungkan kepentingan seluruh Uni Eropa sambil memanfaatkan kekuatan yang beragam dan kebutuhan semua anggotanya. Untuk sukses, intervensi harus terpusat mempertimbangkan kebutuhan dan potensi 550 juta penduduk Uni Eropa, dan khususnya, orang-orang dengan usia muda, yang saat ini tidak begitu mengetahui sistem politik dan ekonomi kawasan Eropa (Harvard University, 2014).

2. Penanganan Krisis Oleh Uni Eropa

Respon Uni Eropa dalam menangani masalah krisis ini bisa kita lihat dari tiga kebijakan yang dikeluarkan, yang pertama dari kebijakan ekonomi makro, kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan fiskal. Dilihat dari kebijakan ekonomi makro, kerangka kebijakan Uni Eropa untuk manajemen krisis sebagian besar dibangun di atas lembaga-lembaga dan prosedur yang ada, namun yang terpenting muncul dari berbagai tindakan kebijakan selama krisis berlangsung. Kerangka ini, pernah sepenuhnya dikembangkan, yang kemudian mencakup instrumen kebijakan yang di antaranya: pencegahan krisis, kontrol krisis dan mitigasi, dan resolusi krisis.

Uni Eropa telah mengambil kebijakan utama terkait kontrol dan penanganan krisis. Kebijakan penyelamatan keuangan telah difokuskan pada pemulihan likuiditas dan modal dari bank dan pemberian jaminan sehingga dapat membuat berfungsinya kembali sistem keuangan. Jaminan deposito ditingkatkan. Pemerintah menyediakan fasilitas likuiditas kepada lembaga keuangan yang dalam kesulitan, bersama dengan jaminan negara atas kewajiban mereka, lalu diikuti oleh suntikan modal.

Krisis keuangan menyebabkan penurunan tajam dalam kegiatan ekonomi dari kuartal keempat tahun 2008 dan seterusnya. Hal ini memaksa bank sentral Uni Eropa dan pemerintah untuk mengadopsi sikap ekspansif yang luar biasa dari kebijakan ekonomi makro. Selain menurunkan biaya pinjaman, bank sentral mengambil tempat sebagai pusat penyedia likuiditas, sehingga memastikan alokasi dana bank jangka pendek di pasar uang tidak berfungsi. Dukungan keseluruhan biaya ekonomi pemerintah pada tahun 2009 dan 2010, yang diukur dengan penurunan saldo pemerintah, sebesar 5 poin persentase di Uni Eropa (sekitar 4 ½ poin persentase di kawasan euro).

Selanjutnya dilihat dari kebijakan moneter, bank-bank sentral di Uni Eropa tidak merespon tegas terhadap meningkatnya ketegangan di pasar uang setelah runtuhnya Lehman Brothers. ECB menurunkan biaya pinjaman sebesar 50 basis poin menjadi 3,75% dalam sebuah langkah koordinasi dengan Bank of England, Sveriges Riksbank dan berbagai bank sentral non-Uni Eropa pada awal Oktober 2008. Penurunan suku bunga lebih lanjut diikuti dari Oktober 2008 sampai musim panas 2009, yang mengarah pada pengurangan tingkat kebijakan patokan ECB oleh 325

basis poin menjadi 1%. Demikian pula, Bank of England dan Riksbank menurunkan suku kebijakan mereka dengan 400 basis poin.

Selain menurunkan biaya pinjaman, seperti yang telah disebutkan, bank sentral mengambil tempat sebagai pusat penyedia likuiditas, sehingga memastikan alokasi dana Bank jangka pendek di pasar uang tidak berfungsi. Untuk tujuan ini, ECB memenuhi semua tawaran likuiditas pada tingkat bunga tetap, memperluas koridor suku bunga (dengan deposito suku bunga ECB sebesar 0,25% sejak April 2009, menarik tarif efektif semalam untuk nol) dan menyediakan likuiditas dalam mata uang asing.

Dengan tujuan mendukung pendanaan jangka pendek bank di luar kawasan, ECB juga menaikkan volume yang dialokasikan dalam operasi tiga bulan *refinancing* dan memperkenalkan enam bulan dan dua belas bulan operasi *refinancing*. Langkah-langkah yang sebanding juga diterapkan oleh bank sentral di luar kawasan euro. Pada bulan Mei 2009, ECB menambahkan langkah-langkah kebijakan yang tidak konvensional untuk mendukung pasar keuangan, persetujuan untuk membeli obligasi tertutup terhadap mata uang euro untuk jumlah total EUR 60 miliar. Program pelonggaran kredit ini mirip dengan bentuk fasilitas pembelian aset yang diperkenalkan oleh Bank of England pada Maret 2009.

Yang terakhir dilihat dari kebijakan fiskal, sebagaimana dicatat, Uni Eropa juga telah memberikan kontribusi yang adil dalam hal dukungan fiskal untuk mengatasi krisis global. Dengan Program Pemulihan Ekonomi Eropa atau *European Economic Recovery Programme* (EERP), Uni Eropa telah mendefinisikan kerangka

kerja yang efektif untuk mengatasi krisis ekonomi, menggabungkan rangsangan fiskal yang aktif dengan reformasi struktural. Program ini, seperti yang disahkan oleh Dewan Eropa pada bulan Desember 2008, diperkirakan total hampir 2% dari PDB selama 2009-2010, termasuk EUR 20 miliar (0,3% dari PDB Uni Eropa) melalui pinjaman yang didanai oleh Bank Investasi Eropa.

Dampak pertumbuhan masing-masing program dapat berbeda di berbagai negara, tergantung pada karakteristik perekonomian mereka (seperti keterbukaan atau jumlah kendala kredit pada rumah tangga mereka). Perkiraan menunjukkan langkah-langkah fiskal bisa meningkat antara 0,5- 1% pada tahun 2009 dan 0,3- 0,6% pada tahun 2010. Kisaran perkiraan mencerminkan ketidakpastian berkaitan dengan sejauh mana kredibilitas tindakan kebijakan sementara tersebut.

C. Dampak Krisis Eropa Terhadap Perekonomian Indonesia

Di Indonesia, krisis Eropa tentu saja dapat sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia, mengingat perekonomian Indonesia yang semakin terbuka, maka Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal yang membawa dampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia. Pengaruh krisis Eropa terhadap perekonomian domestik mengalir melalui beberapa kemungkinan, yaitu: transmisi keuangan berdasarkan adanya perubahan terhadap suku bunga dan moneter, terhadap nilai tukar mata uang, kredit, dan surat utang pemerintah; transmisi fiskal seperti utang luar negeri; transmisi perdagangan yang berupa ekspor dan impor; transmisi

investasi yang berupa FDI dan Portfolio dan transmisi komoditas yang berupa perubahan harga terhadap komoditas tersebut.

Dampak krisis keuangan Eropa terhadap pasar keuangan dalam negeri dapat dilihat pada perubahan harga saham tempat pasar bereaksi terhadap kondisi eksternal dan internal. Kemudian melemahnya nilai tukar karena adanya aksi dari para investor menarik diri dari Indonesia. Selain itu, dampak lain dari krisis ini adalah adanya peningkatan *internat debt* yang mana dikarenakan sentimen global dari ketidakpastian yang terjadi di pasar dunia.

Pada akhirnya, dampaknya terhadap ekonomi domestik akan terasa pada sektor riil dimana volume dan nilai ekspor dapat mengalami penurunan, investasi menurun dan pendapatan masyarakat melemah. Krisis ini juga akan mempengaruhi inflasi domestik bergantung pada beberapa hal seperti pada perubahan harga komoditas, nilai tukar dan impor. Perlambatan yang terjadi dalam perekonomian dan munculnya gejala inflasi dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Akibatnya, pada sisi fiskal terjadi peningkatan dalam kebutuhan pembiayaan yang dilakukan pemerintah terutama dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun mendukung penerapan kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Proses pemulihan ekspor Indonesia yang terjadi di tahun 2010 terlihat terus berlanjut sampai dengan tahun 2011. Pangsa pasar tujuan ekspor telah mengalami pergeseran. Pada lima tahun yang lalu, ekspor nonmigas ke Jepang memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nonmigas Indonesia dengan kontribusinya

sebesar 15,3%, namun kemudian pangsa pasarnya terus menurun hingga pada tahun ini peranannya terhadap ekspor nonmigas hanya sebesar 11,2%. Demikian pula halnya dengan share ekspor nonmigas Indonesia yang ditujukan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa terus menurun, dimana dalam semester I tahun 2011 berkisar pada angka: 10,0% dan 13,4%; sehingga total pangsa pasar ekspor nonmigas ke kedua pasar tersebut adalah sebesar 23,4%.

Pada triwulan III tahun 2011 Eropa merupakan investor utama di bidang pertambangan dan penggalian dengan dengan nilai investasi dibidang tersebut sebesar USD 3.401 juta (71,9%). Berdasarkan World Investment Report, UNCTAD 2011, Indonesia menjadi negara ke 20 terbesar penerima aliran masuk FDI pada kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2010. Aliran masuk FDI mencapai sekitar USD 13 miliar pada tahun 2010. Hal tersebut terjadi karena stabilitas pertumbuhan ekonomi, dan besarnya permintaan domestik dan eksternal yang terjaga.

Sementara itu, pada triwulan yang sama kinerja Neraca Transaksi Berjalan masih stabil. Penerimaan ekspor meningkat 1,8% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan pengeluaran impor meningkat sebesar 2,5% dalam periode yang sama. Walaupun demikian, Neraca Transaksi Modal dan Finansial ternyata mengalami defisit sebesar USD 3,4 miliar. Defisit Neraca Transaksi Modal dan Finansial disebabkan oleh defisit di sisi investasi portofolio sebesar USD4,7 miliar. Hal ini menandakan mulai merebaknya dampak krisis Eropa bagi ekonomi Indonesia.

Dampak tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2012 yang ditandai dengan menurunnya surplus Neraca Transaksi Berjalan. Penurunan surplus

transaksi berjalan terkait dengan berkurangnya permintaan dari Eropa dan Amerika Serikat. Walaupun Neraca Modal dan Finansial diperkirakan tetap surplus namun secara keseluruhan tidak mampu menopang penurunan Neraca Transaksi Berjalan sehingga surplus Neraca Pembayaran pada tahun 2012 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2011.

Secara keseluruhan, dampak krisis Eropa ini dapat di bagi menjadi: saat krisis belum terlalu dalam (jangka pendek) dan saat krisis sudah semakin dalam (jangka panjang). Dalam jangka pendek, krisis Eropa yang mendalam hingga menjadi krisis Global memberi dampak terutama pada sektor keuangan dan harga komoditi, sedangkan sektor riil belum mendapat pengaruh perubahan yang besar. Kondisi pelemahan nilai tukar Rupiah juga tergantung pada kecukupan cadangan devisa untuk meredam pelemahan nilai tukar tersebut.

Indikasi kemungkinan tidak cukupnya cadangan devisa dapat dilihat dari cadangan devisa yang menurun sekitar USD 10 miliar dari USD 124,6 miliar pada bulan Agustus 2011 menjadi USD 114,5 miliar pada akhir bulan September 2011 dalam rangka intervensi pasar. Sedangkan dalam jangka panjang, krisis Eropa akan memberi dampak penurunan terutama terhadap perdagangan, sedangkan sektor finansial relatif membaik. Pulihnya sektor finansial didorong oleh meningkatnya kepercayaan para investor terhadap perekonomian negara-negara *Emerging* termasuk Indonesia (BPPN, 2011).

Jadi walaupun perekonomian Indonesia khususnya FDI dan sektor keuangan mengalami defisit yang cukup parah namun sektor-sektor yang terkena dampak

tersebut perlahan-lahan membaik, kecuali perdagangan yang masih dalam masa defisit yang cukup sulit.

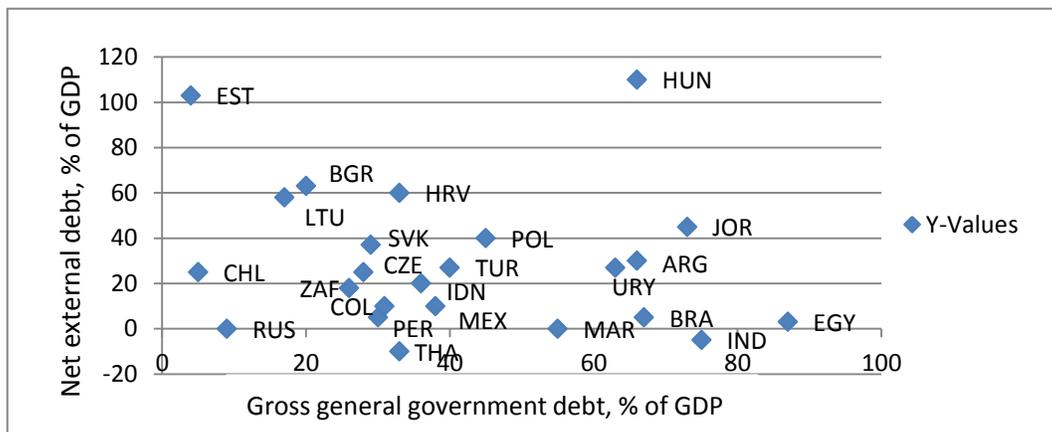
D. Dampak Krisis Eropa Terhadap Perekonomian Hongaria

Sedangkan, di Hongaria sendiri. Kita tahu bahwa krisis keuangan tahun 2008 ‘menghantam’ Hongaria lebih cepat, dan menjadikan Hongaria sebagai negara pertama yang memimpin negara lain yang juga terkena dampak krisis untuk meminta bantuan IMF pada akhir Oktober 2008. Sangat di mengerti bagaimana posisi Hongaria sebagai negara yang berada di bawah tekanan pada saat itu. Adapun gambar berikut akan menggambarkan plot utang luar negeri bersih dari sejumlah negara-negara berkembang (publik dan swasta) terhadap utang publik mereka. Pada akhir tahun 2007 kebanyakan negara berkembang memiliki utang luar negeri yang tinggi atau utang dalam negeri yang tinggi. Namun dalam hal ini, Hongaria adalah satu-satunya negara yang memiliki utang luar negeri dan utang dalam negeri yang tinggi.

Utang eksternal (luar negeri) yang tinggi membuat negara rentan secara keuangan, terutama jika sebagian besar utang denominasi mata uang asing. Telah disampaikan bahwa utang di sektor swasta, terutama utang bank, adalah kewajiban kontinjensi pemerintah. Dalam masa krisis, pemerintah kemungkinan akan membail-out sektor swasta (Kaminsky & Reinhart, 1999). Jika utang luar negeri tinggi tetapi utang dalam negeri masih rendah, maka pemerintah memiliki kemampuan untuk membail-out sektor swasta saat guncangan eksternal yang merugikan ‘memukul’ neraca keuangan di sektor swasta.

Namun, jika keduanya, utang luar negeri dan utang dalam negeri berada pada angka yang tinggi, maka pemerintah mungkin tidak dapat membail-out sektor swasta atau jika tidak sektor swasta mungkin akan default segera setelah kerugian akibat krisis semakin memuncak kecuali jika pemerintah Hongaria mendapatkan bantuan dari luar (Reinhart & Rogoff, 2010).

Grafik 3.1 Public Debt and External Debt in Emerging Markets in 2007



Source: Quarterly External Debt Data Base at the World Bank, last accessed on 19 October 2011, World Development Indicators, September 2011 (EEAG, 2012).

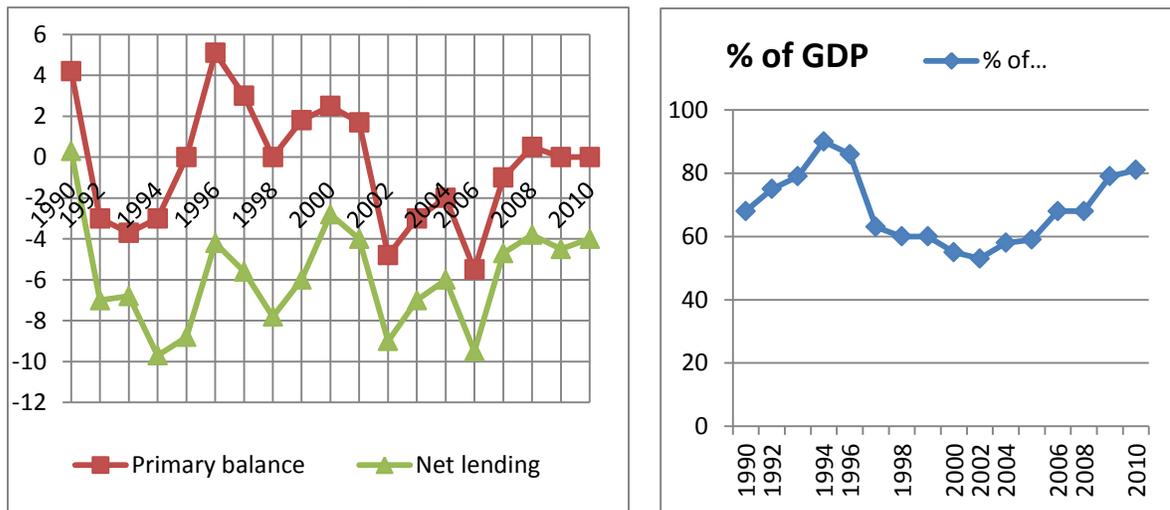
1. Utang Dalam Negeri

Berdasarkan penjelasan mengenai krisis keuangan yang telah meruntuhkan perekonomian negara-negara di Eropa, penulis melihat Hongaria termasuk dalam daftar negara-negara yang terkena dampak dari krisis tersebut. Hongaria telah berada di bawah *Excess Deficit Procedure* atau Prosedur Defisit Berlebih dari Uni Eropa sejak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Penjelasan mengenai defisit Hongaria juga dijelaskan oleh Victor Orban, Perdana Menteri Hongaria, Ia menyatakan bahwa kondisi perekonomian Hongaria sekarang ini ada pada situasi

yang sangat kritis, hal ini diakibatkan oleh kekhawatiran pemerintah mengenai defaultnya kredit perumahan di Hongaria.

Pada gambar di bawah ini dapat kita lihat terdapat evolusi defisit sejak tahun 1990. Terdapat siklus pemilu yang kuat dalam tahun fiskal dimana defisit meningkat secara signifikan sebelum pemilihan tunggal sejak tahun 1990. Siklus pemilu yang sangat kuat ini rusak oleh krisis keuangan yang terjadi hingga menjelang pemilu tahun 2010, ketika pemerintah yang lemah secara politik terus melaksanakan program konsolidasi fiskal sejak tahun 2007. Selain itu, sangat sedikit koreksi fiskal yang terjadi setelah pemilu tahun 2002, defisit pemerintah umumnya melebihi 5% dari PDB hingga tahun 2007 dan disertai dengan akumulasi utang di sektor publik antara tahun 2001 dan 2007.

Grafik 3.2 Saldo dan Utang Pemerintah Hongaria



Sources: Barabás et al. (1998) for the period 1990-1994, Eurostat for the period 1995-2010, last accessed on 19 October 2011.

Lembaga keuangan Hongaria tidak dapat menjalankan politisi untuk kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Fakta ini berdasarkan eksperimen dengan Dewan

Fiskal di Hongaria (lihat Lampiran 2). Sebagai akibat dari memburuknya keuangan pemerintah pada tahun 2005 dan 2006, penyesuaian fiskal merupakan hal yang perlu dilakukan. Sebagai bagian dari program penyesuaian ini, parlemen berhasil melewati *Fiscal Responsibility Act* pada tahun 2008, dengan mendirikan sebuah Dewan Fiskal Independen.

Setelah memenangkan mayoritas dua pertiga pada bulan April 2010, pemerintahan baru *centre-right* menghilangkan dewan tersebut dan mendirikan sebuah badan baru. Secara khusus, Dewan Fiskal baru telah memberhentikan para staf-nya yang mana hal tersebut membuat kekuasaannya menurun secara drastis. Tanpa perkiraan dan analisis dewan independen, mustahil bagi dewan baru untuk menyediakan jenis transparansi fiskal dan evaluasi keberlanjutan seperti yang dilakukan dewan sebelumnya.

Undang-undang menegaskan bahwa Parlemen yang lulus proposal anggaran ditujukan untuk mengurangi peningkatan utang publik. Selain itu, memerintahkan Dewan Fiskal untuk mengevaluasi apakah anggaran yang diusulkan memenuhi kriteria ini atau tidak. Namun, ketika undang-undang baru yang mengatur tentang stabilitas keuangan dibentuk ternyata memperlemah persyaratan konstitusional dengan membuat plafon utang yang berlaku mulai 2015 dan seterusnya, dan menyatakan bahwa hal itu tidak berlaku setiap kali GDP menurun.

Adapun mengabadikan aturan fiskal dalam konstitusi dapat membantu untuk membuat kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan mengembalikan kredibilitasnya. Namun, tanpa pemantauan dewan independen, seperti evaluasi dan perkiraan yang

dilakukan oleh Dewan Fiskal Hongaria yang pertama, maka sulit untuk melihat bagaimana satu kinerja yang secara meyakinkan dapat memverifikasi apakah pemerintah benar-benar mengikuti aturan yang ada (Calmfors & Wern-Lewis, 2011).

Meskipun kurangnya komitmen, penyesuaian fiskal yang signifikan berlangsung pada tahun 2007-2010 karena tekanan dari pasar dan Komisi Eropa. Krisis keuangan bahkan tidak memungkinkan Hongaria untuk melanjutkan kebijakan fiskal, karena peminjaman jadi lebih sulit dan mahal. Bagaimanapun, menempatkan pengurangan defisit pada landasan yang kokoh ternyata menjadi tugas yang sulit karena besarnya sektor publik di Hongaria. Ada beberapa kriteria untuk mengetahui apakah ukuran sektor publik kecil atau besar, tapi salah satu yang pasti berdasarkan penelitian yakni bahwa ukurannya cenderung mengalami kenaikan sesuai dengan tingkat pendapatan rata-rata.

Meskipun upaya konsolidasi fiskal sejak tahun 2007, namun anggaran belanja pemerintah masih tetap dikatakan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan beban pajak yang tinggi dan inefisiensi belanja pemerintah mungkin menjadi salah satu penghalang untuk pertumbuhan ekonomi di Hongaria. Selain itu, siklus pemilu yang kuat meningkatkan volatilitas permintaan agregat. Dimana semakin tinggi ketidakpastian agregat dalam perekonomian yang dihasilkan oleh ketidakpastian fiskal adalah hambatan lain untuk pertumbuhan ekonomi.

2. *External Debt* (Utang Luar Negeri)

Selama akses ke Uni Eropa, negara-negara dari Eropa Tengah dan Eropa Timur meliberalisasi pergerakan modal. Privatisasi di korporasi dan sektor perbankan menyebabkan hadirnya perusahaan multinasional di Hongaria. Perusahaan multinasional ini memiliki akses yang memudahkan mereka untuk masuk ke pasar modal internasional.

Secara khusus, perbankan didanai dengan biaya rendah oleh bank-bank induk yang menawarkan pinjaman hipotek dengan biaya rendah untuk rumah tangga yang menggunakan mata uang asing, terutama dalam franc Swiss. Menganggap rendah nilai tukar beresiko bagi perusahaan dan rumah tangga, khususnya rumah tangga dengan likuiditas yang terbatas yang bentuk pembayaran bulannya menggunakan mata uang asing (Rosenberg & Tirpák, 2008), (Brzoza-Brzezina, Chmielewsk, & Niedźwiedzińsk, 2010).

Besarnya pinjaman mata uang asing menciptakan alur baru bagi nilai tukar untuk memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap neraca keuangan di sektor swasta. Antara September tahun 2008 dan Maret tahun 2009, forint relatif terdepresiasi sebesar 24% terhadap euro dan relatif 34% terhadap franc Swiss. Nilai tukar euro tidak banyak mengalami perubahan akan tetapi depresiasi dari mata uang forint, *visa-vis*, dan franc Swiss antara September tahun 2008 dan November tahun 2011 mencapai 66%. Rasio pinjaman mata uang asing dalam PDB naik sebesar 30% pada kuartal ketiga 2008. Adapun depresiasi juga menyebabkan kenaikan yang

signifikan dalam pembayaran bulanan dari waktu ke waktu dan peningkatan pinjaman.

Selain itu, bank Hongaria berisiko *rollover*¹, dimana bank utama meminjamkan uang franc Swiss dikarenakan permintaan kredit franc Swiss lebih tinggi dari permintaan kredit euro. Hal tersebut akibat tingkat bunga yang lebih rendah pada pinjaman franc Swiss. Dalam hal ini, mata uang dalam kas Bank Hongaria adalah euro. Tentu saja hal ini menyebabkan tingkat depresiasi semakin meningkat. Karena hal tersebut, Bank Hongaria kemudian menukar dana euro mereka dengan franc Swiss di pasar *swap*². Kontrak swap tersebut perlu diperpanjang secara berkala sejak jatuh tempo yang lebih pendek dari jangka waktu pinjaman hipotek.

Akhirnya, penguasa di Hongaria merasa semakin mudah untuk menerbitkan obligasi; sehingga meningkatkan risiko rollover dari penguasa. Adanya default rumah tangga dan risiko rollover bank berpotensi berguna untuk menarik aset Hongaria. Hal ini membuat Hongaria berpaling ke IMF, yang bersama-sama dengan Komisi Uni Eropa menyediakan bail-out sebesar €20 milyar.

¹ Rollover yaitu: 1. deposito berjangka atau sertifikat deposito yang telah jatuh tempo diperpanjang kembali dengan syarat-syarat baru dan tingkat bunga yang berlaku; 2. pinjaman berjangka Eurodolar yang secara periodik dinilai kembali pada spread yang disepakati bersama berdasarkan tingkat indeks pasar, misalnya LIBOR; 3. jual beli mata uang asing dalam satu hari kerja yang bentuknya beragam bergantung pada tanggal transaksi dan penyerahan pada hari kerja berikutnya, transaksi tersebut berupa perpanjangan semalam (*overnight rollover*), yang biasanya melibatkan instrument pasar uang; 4. memperpanjang jatuh tempo. Diakses pada 30 Januari 2017.

² Dalam bahasa Inggris *swap* artinya tukar-menukar atau barter, yaitu cara yang dipakai untuk melindungi nilai hasil penjualan ekspor, modal yang ditanamkan atau dipinjam dari luar negeri dari kemungkinan akibat fluktuasi kurs mata uang. Dalam keadaan seperti itu, fasilitas melalui *swap* yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menunjang kelangsungan transaksi internasional.

E. Dampak Krisis Eropa Terhadap Kerjasama Indonesia-Hongaria

Hubungan kedua negara ini memang tidak berjalan seperti seharusnya karena berbagai kendala yang dihadapi terutama kendala akibat krisis Eropa. Dampak dari ekonomi global dan ketidakseimbangan keuangan serta krisis di tahun 2008, telah memukul Hongaria jauh lebih parah daripada Indonesia, resesi yang dijalankan selama bertahun-tahun jelas tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda perkembangan. Sebaliknya, Indonesia menampilkan ketahanan yang luar biasa selama tahun-tahun krisis dengan dampak yang kecil pada angka pertumbuhan ekonomi.

Dapat kita lihat pada tahun 2010, volume perdagangan bilateral mencapai US \$ 220.830.000, dan naik menjadi US \$ 438.340.000 pada tahun 2011. Namun, perlambatan ekonomi yang melanda Eropa menyebabkan perdagangan merosot ke US \$ 183.5 juta untuk periode Januari-Oktober 2012. Adapun total ekspor Indonesia ke Hongaria dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3 Ekspor Indonesia ke Hongaria dalam USD Juta



Source: Trading Economics (2017)

Ekspor Indonesia ke Hongaria rata-rata USD 64,55 juta dari tahun 1999 hingga tahun 2015. Beralih pada tahun 2014, ekspor Indonesia mencapai USD 87 juta namun kembali lagi menurun hingga USD 58,32 juta pada tahun 2015.

Dalam laporan Kemendag RI, total perdagangan Indonesia dan Hongaria selama 5 tahun (2008-2012) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,89%, dimana total perdagangan tahun 2008 sebesar USD 71,9 juta dan tahun 2012 sebesar USD 223,2 juta. Adapun Ekspor Indonesia ke Hongaria pada tahun 2008-2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,79%, hal ini juga berdasarkan realisasi ekspor Indonesia pada tahun 2008 yang berkisar dari USD 39,9 juta ke USD 60,8 juta pada tahun 2012. Lalu kemudian, untuk impor Indonesia dari Hongaria sendiri tumbuh hingga 11,93% dilihat dari jumlah impor tahun 2008 dari USD 31,9 juta meningkat menjadi USD 162,4 juta di tahun 2012. Dan selama periode 2008-2012 ini, dalam perdagangan Indonesia dengan Hongaria ternyata terjadi defisit dalam perekonomian Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2013).

Adapun impor Indonesia dari Hongaria bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dimana Impor Indonesia dari Hongaria menurun sebesar USD 62,40 juta pada tahun 2014 dan USD 62,25 juta pada tahun 2015. Impor Indonesia dari Hongaria rata-rata USD 67,11 Juta dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015, dengan angka tertinggi sebesar USD 341,00 Juta pada tahun 2011 sedangkan angka terendahnya USD 6,00 Juta pada tahun 1999.

Grafik 3.4 Impor Indonesia dari Hongaria



Source: *Trading Economics* (2017)

Selanjutnya pada tahun 2014, ekspor Hongaria mencapai \$ 106 miliar dan impor \$ 99 miliar, sehingga neraca perdagangan positif sebesar \$ 6,35 miliar. Pada tahun itu juga, PDB Hongaria mencapai \$ 138 miliar. Adapun ekspor teratas Hongaria yaitu Mobil (\$ 10,3 miliar), Suku Cadang Kendaraan (\$ 5,19 miliar), Mesin Spark-Ignition (\$ 3,97 miliar), Obat-obatan (\$ 3,62 miliar) dan Komputer (\$ 3,36 miliar). Sedangkan, impor teratasnya yaitu Suku Cadang Kendaraan (\$ 5,25 miliar), Crude Petroleum (\$ 4,38 miliar), Petroleum Gas (\$ 3,73 miliar), Obat-obatan (\$ 2,74 miliar) dan Engine Parts (\$ 2,49 miliar) (OEC, 2014).

Lalu pada tahun 2015, total perdagangan kedua negara mencapai Rp 103,4 miliar. Bukan hanya Hongaria, posisi Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam hubungan kedua negara ini dengan surplus perdagangan antar kedua negara sebesar USD \$ 6,8 miliar.

Tabel 3.4 Perdagangan Antara Indonesia dan Hongaria

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Import to Indonesia (in billion USD)	146.9	341.2	162.4	110.3	62.4	48.3
Export to Hungary (in billion USD)	73.9	97.2	60.8	91.2	86.9	55.1
Balance	73.0	234.9	101.6	19.1	24.5	6.8

Source: Indonesian Trade Ministry (VDSI, 2016)

Pada tabel di atas, dapat kita lihat ekspor Indonesia yang mengalami penurunan tepatnya pada kuartal ke-3 tahun 2015. Hal ini di karenakan adanya ketidakstabilan dalam pelaksanaan perdagangan antara kedua negara. Namun jika dibandingkan dengan Januari 2015, neraca perdagangan antara Indonesia dan Hongaria mencatat surplus bagi Indonesia. Walaupun dengan ekspor yang meningkat sebesar 37,48% dan impor yang dalam posisi menurun sebesar 5,73%.

Pada bulan Desember 2016, Hongaria juga mencatat surplus sebesar HUF 180.161,88 juta. Adapun neraca perdagangan di Hongaria rata-rata dari tahun 1988 sampai 2016 sebesar HUF 19.176,90 juta, dan mengalami peningkatan pada bulan Juni 2016 sebesar HUF 363.667,97 juta. Sedangkan, pada April 2004 merupakan yang terendah bagi neraca perdagangan Hongaria yaitu hanya sebesar HUF 246.915 juta. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 3.5 Hungary Balance of Trade



Source: *Trading Economics* (2017).

Walau demikian, melihat kembali usaha kedua negara maka dapat dikatakan bahwa saat ini kedua negara sedang menikmati tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Dimana dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menduduki peringkat yang tercepat ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi berdasarkan kelompok negara G20, sementara Hongaria menjadi salah satu negara di Uni Eropa dengan perekonomian yang paling dinamis pada tahun 2014.